

BPOM. Membeli barang-barang dari seles kalau alat-alat kosmetik Saksi tidak tahu dari mana dibelinya, yang mengelola Toko Jasa Tamita adalah suami Saksi. Namun saksi tidak tahu pada tahun 2009 ada teguran terhadap barang-barang yang ada di Toko Jasa Tamita dan Surat Izin Usaha Toko Jasa Tamita atas nama Saksi, Terdakwa sebagai pengelola. Adapun saksi baru mengetahui bahwa Surat Izin Usaha Toko Jasa Tamita adalah untuk barang kelontong tetapi menjual alat- alat kosmetik karena yang mengurus surat izin usaha suami Saksi dan saksi hanya menandatangani saja dan menikmati hasil dari keuntungan toko tersebut.

- 2) Saksi Silvana Binti Muklizar pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi bekerja dan digaji oleh Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah/famili, pertama Saksi dibagian Kelantong dan sekarang dibagian kosmetik baru 8 bulan. Alat-alat kosmetik yang menjadi barang bukti dan diperlihatkan di persidangan ini yang dijual dibawa oleh sales ke Toko Jasa Tamita dan dijual bervariasi harganya. Sepengetahuan saksi tidak boleh diperjualkan barang tanpa ada izin dari BPOM dan tidak pernah memakai kosmetik yang dijadikan barang bukti karena takut timbul kemerah-merahan karena tidak ada izin dari BPOM. Namun saksi tidak ahli di bidang kosmetik dan tidak pernah mengikuti pelatihan tentang kosmetik dan tidak pernah ada orang kesehatan datang untuk memeriksa kosmetik.
- 3) Saksi Iskandar Sulaiman pada pokoknya memeberikan keterangan bahwa yang saksi ketahui adalah masalah kosmetik pada tanggal 28 Desember

2011 BPOM beserta Polda Aceh datang ke Aceh barat untuk melakukan operasi gabungan dan kami datang ke Toko Jasa Tamita di Meulaboh untuk melakukan pemeriksaan kosmetik/farmasi dan lain-lainnya. Saat melakukan operasi kosmetik di Meulaboh ada 3 (tiga) sesuai dengan surat tugas dari BPOM, sebenarnya melakukan pemeriksaan 5 (lima) tempat yaitu Toko Jasa Tamita, Depot obat di Jalan Terminal, Supermarket di Jalan Nasional dan 2 (dua) lagi tidak sempat datang karena waktu tidak cukup. Sepengetahuan saksi bahwa kosmetik dilarang dijual karena tidak terdaftar di BPOM ditakutkan mengandung bahan berbahaya dan tidak tahu zat apa yang digunakan untuk bahan kosmetik karena bisa merusak wajah bagi yang memakai. Adapun barang dari luar harus juga terdaftar di BPOM walaupun sudah terdaftar di Negara asalnya untuk memastikan bahan apa yang digunakan dan barang ilegal tidak masuk ke Kas Negara dan keuntungannya diambil oleh pengimport dan cara untuk mengetahui barang tersebut sudah ada izin dari BPOM ada label di kemasan, semua barang yang di keluarkan oleh perusahaan semua di uji terlebih dahulu kalau layak baru di keluarkan bahwa barang bukti ini tidak ada di uji, barang penyelundupan dan merk barang yang di periksa lebih kurang 83 merk.

- 4) Saksi Ayu Miranda Away pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi sebagai ahli menyangkut kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan kosmetik yang di jadikan barang bukti menurut ahli produk luar negeri tidak ada izin edar dari BPOM tidak boleh dijual dan barang tersebut

adalah barang ilegal, yang dirugikan Negara dan yang diuntungkan bagi pemasok atau penjual. Dampak negatif bagi masyarakat, tidak dapat dijamin untuk memakai karena diragukan bahan apa yang digunakan untuk membuat kosmetik tersebut. Bisa menimbulkan bercak merah dibagian muka, bisa kanker kulit bahkan sampai kematian dan efeknya kalau mengandung bahan berbahaya bisa menjadi gatal-gatal atau kanker kulit.

- 5) Saksi Ahmad Razi memberikan keterangan bahwa saksi ikut dalam TIM Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) bersama dengan Petugas dari Balai Besar POM Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 14.30 Wib yang pada saat itu melakukan Operasi di Kabupaten Aceh Barat tepatnya di Toko Jasa Tamita yang di kelola oleh Terdakwa. Pada saat melakukan Operasi dan memeriksa barang-barang di Toko Jasa Tamita khususnya obat-obatan dan kosmetik, Saksi bersama dengan Petugas lainnya menemukan kosmetik yang tidak ada izin edar atau tidak terdaftar dari BPOM atau dengan kata lain barang-barang kosmetik di Toko Jasa Tamita yang dikelola oleh terdakwa adalah barang ilegal karena mengandung bahan berbahaya yang sebelumnya sudah ada peringatan Publik dari Badan POM RI di dalam etalase kaca pada ruangan paling depan. Namun saat di interogasi oleh Petugas bahwa Kosmetik yang tidak ada izin edar dari BPOM yang berada di Toko Jasa Tamita yang dikelola oleh terdakwa tersebut di dapat terdakwa dari Salesman yang berasal dari Medan dengan cara di antar langsung ke Toko Jasa

Bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut dan kesengajaan yang dapat dipidana haruslah memiliki unsur perbuatan yang dilarang dan akibat yang menjadi pokok alasan dilarangan itu melanggar hukum. Berdasarkan kronologis peristiwa yang telah disebutkan oleh para saksi, ahli dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta bahwa terdakwa mengetahui dilarang menjual kosmetik yang tidak ada izin atau tidak memiliki nomor dan terdaftar di Badan POM. Atas dasar pertimbangan fakta-fakta di atas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah menjual obat, bahan, obat tradisional dan kosmetik dan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan, pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Persediaan atau sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan izin edar oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah Badan Pegawai

Obat dan Makanan (BPOM). Atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-3 ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, keseluruhan unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Mengedarkan Kosmetik yang tidak Memiliki Izin Edar”.

Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dengan mempertimbangkan pemberatan terdakwa ada menerima surat teguran dan pemberitahuan tentang kosmetik yang tidak boleh dijual karena tidak ada nomor registrasi dari Badan POM, sedangkan hakim mempertimbangkan dengan keringanan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada sebabnya yaitu ketidaktahuan secara menyeluruh sebagai pengelola toko kelontong yang juga menjual kosmetik, namun tidak mengetahui kosmetik apa saja dan seperti apa yang tidak boleh dijual dan kurangnya informasi dari pengawas Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan juga tidak ada penyuluhan dari Badan POM Banda Aceh yang tidak memberitahukan secara jelas dan lengkap terhadap kosmetik apa yang tidak boleh dijual dan kenapa tidak boleh dijual.

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh terpidana tidak dihitung dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 83 (Delapan Puluh Tiga) Jenis Kosmetika dengan berbagai macam Merk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak ada izin edar dari BPOM RI;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).